



RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

-  (024) 3584086
-  3584085
-  kopumkmsg@gmail.com
-  www.diskopumkm.semarangkota.go.id





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : B/143/050/IX/2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 dan Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2023, maka Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor 227/050/VII/2021 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur. Djawa Tengah. Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Hegara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 108);
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023;
- KEDUA :** Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- KETIGA :** Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 29 September 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA SEMARANG



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2023

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DOPD TAHUN 2023	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Kota Semarang	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kota Semarang.....	23
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD Kota Semarang.....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD KOTA SEMARANG	36
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD Kota Semarang.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KOTA SEMARANG	45
BAB V PENUTUP.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....	10
Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	18
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran.....	23
Tabel 2. 4 Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	25
Tabel 2. 5 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	25
Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023..	30
Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023	44
Tabel 4. 1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	46

DAFTAR GAMBAR

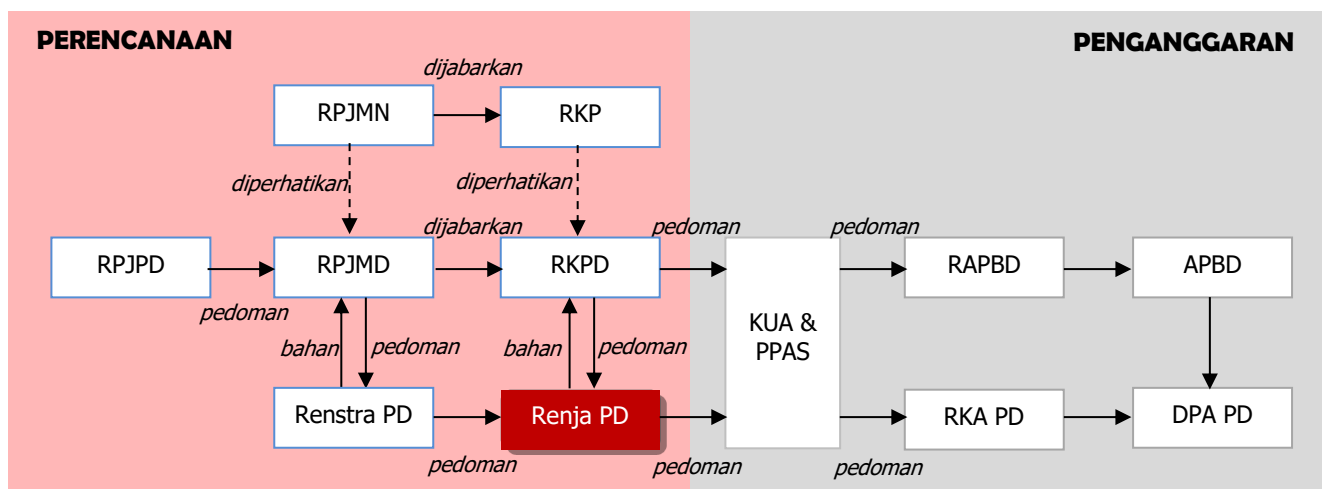
Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD	1
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, telah dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah pada tahun berjalan; (2) untuk menyikapi perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2023; (3) Perlunya penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) adanya Penyesuaian target pendapatan serta pagu indikatif.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- y. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai

alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPDP, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	9 dok	10 dok	4 dok	40,00	13	28,26
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	2 dok	2 dok	0 dok	0,00	2	20,00
		Jumlah Dokumen RTP			1 dok	1 dok	100,00	1	1,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00	2	40,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1	20,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1	20,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1	20,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	3 dok	3 dok	0 dok	0,00	3	20,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	9	300,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	8 jenis	5 jrnis	2 jenis	40,00	10	200,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	35 jenis	35 jenis	3 jenis	0,57	38	108,57
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	1 jenis	12,50	9	112,50
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	4	200,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50,00	18	150,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50,00	18	150,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50,00	8	160,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 unit	6 unit	3 unit	0 unit	0,00	6	200,00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100,00	7	350,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	2	200,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100,00	50	200,00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	0	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	7 unit	4 unit	57,14	9	180,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	-	100%	50%	50,00	50	50,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	3 dok	3 dok	1 dok	33,33	3	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	2	40,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 laporan	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0,00	2	20,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	0%	0,00	3	100,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	1 koperasi	6,67	31	41,33
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 unit usaha	30 unit usaha	80 unit usaha	0 unit usaha	0,00	30	20,00
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	0	0,00	1	10,00
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	150 unit usaha	25 unit usaha	140 unit usahaa	0 unit usaha	0,00	140	93,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam							
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50,55%	50%	18,89%	37,78	69,44	138,88
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	490 koperasi	271 koperasi	55,31	641	534,17
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 unit usaha	250 unit usaha	370 unit usaha	151 unit usaha	40,81	401	229,14
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 unit usaha	120 unit usaha	240 unit usaha	120 unit usaha	50,00	240	137,14
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35%	56,25%	31%	23,29%	75,13	79,54	227,26
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	67%	43,53%	64,97	111,52	159,31
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 unit usaha	240 unit usaha	300 unit usaha	170 unit usaha	56,67	410	136,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	45,36%	10%	38,65%	386,5	84,01	840,10
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	72%	67,48	93,72	144,11	180,14
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	80 orang	360 orang	367 orang	101,94	447	111,75
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2%	1,82%	-	1,2%	-	3,02	151
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	70%	-	-	-	-	-
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	750 Orang	540 orang	-	-	-	-	-
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	26,37%	26%	16,62%	63,92	42,99	143,30
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	56,13%	112,26	116,13	232,26
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 orang	164 orang	500 orang	415 orang	83,00	579	386

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	3,24%	108,00	9,48	316
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	300 orang	2.249 orang	1.050 orang	970 orang	92,38	3.219	1.073
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha	500 unit usaha	649 unit usaha	100 unit usaha	185 unit usaha	185,00	834	166,80
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	500 unit usaha	450 unit usaha	100 unit usaha	200 unit usaha	200,00	650	130,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 unit usaha	650 unit usaha	660 unit usaha	185 unit usaha	28,03	835	83,50
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	1000 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100,00	1.000	100,00
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	-	150 orang	360 orang	240,00	360	48,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25%	47,89%	20%	31,05%	155,25	78,94	315,76
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	200 orang	150 orang	644 orang	429,00	844	140,67
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 unit usaha	2380 unit usaha	500 unit usaha	644 unit usaha	128,8	3024	100,80
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	1 paket	1 paket				

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 8 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 5 indikator kinerja dengan predikat tercapai, 2 indikator memiliki predikat akan tercapai, dan 1 indikator dengan predikat perlu upaya keras, yaitu: Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini disebabkan terbitnya Surat Edaran No 3 Tahun 2023 dari Kemenkop UKM tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Sehingga semua penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam perlu menyesuaikan dengan ketentuan baru tersebut.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pembangunan Gedung PLUT KUMKM dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Pemberdayaan KUMKM serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.636.263.149	4.716.214.776	37,32
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.195.580	498.970	4,09
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	564.080	0	0,00
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	0	0,00
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.729.190	0	0,00
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.610.080	0	0,00
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	0	0,00

2	17	1	2.01	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	498.970	41,14
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.212.357.840	4.105.662.195	44,57
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.960.986.160	4.012.202.195	44,77
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	93.460.000	37,37
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	0	0,00
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	695.200	0	0,00
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.141.188.772	321.980.524	28,21
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.380.275	50.050.000	20,73
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.209.000	3.120.000	11,47
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.077.190	14.629.000	15,55
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.964.379	5.428.400	11,56
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	570.000	29,69
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.000.000	18.182.700	33,67
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.215.860	99.600.424	18,54
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	138.422.068	130.400.000	94,20
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.362.120	36.660.000	38,44
6	6	6	6	5	Pengadaan Mebel	44.837.384	0	0,00
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.524.736	36.660.000	72,56
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	34.253.466	29,37
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	34.253.466	29,37
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.058.518.837	217.159.621	10,55
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	16.839.287	46,37
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.054.470	88.202.334	25,34
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.476.070	14.050.000	27,83
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.623.670.117	98.068.000	6,04

2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	214.521.290	46.456.100	21,66
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	0	0,00
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	0	0,00
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	46.456.100	37,81
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	46.456.100	37,81
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	554.915.380	204.508.220	36,85
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	554.915.380	204.508.220	36,85
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	241.871.090	0	0,00
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	313.044.290	204.508.220	65,33
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	366.205.089	254.609.500	69,53
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.205.089	254.609.500	69,53
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	366.205.089	254.609.500	69,53

2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	626.022.270	261.167.866	41,72
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	626.022.270	261.167.866	41,72
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	626.022.270	261.167.866	41,72
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.932.435.960	992.971.062	33,86
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.932.435.960	992.971.062	33,86
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.932.435.960	992.971.062	33,86
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.561.157.350	1.167.545.044	25,60
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	4.561.157.350	1.167.545.044	25,60
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	325.664.600	99.150.554	30,45
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	227.454.550	87.539.880	38,49
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.128.093.000	365.146.411	17,16
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	467.922.000	202.922.449	43,37
2	17	07	2.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.412.023.200	412.785.750	29,23
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	12.112.719.680	1.514.514.473	12,50
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	12.112.719.680	1.514.514.473	12,50

2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	12.112.719.680	1.514.514.473	12,50
JUMLAH						34.004.240.168	9.157.987.041	26,93

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, dan 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp 34.004.240.168 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 25.435.036.168,- DAK Fisik untuk Pembangunan Gedung PLUT Sebesar Rp. 8.569.204.000,- dan dari DAK Non Fisik untuk pemberdayaan KUMKM sebesar Rp. 420.370.000,-

Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 9.157.987.041. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 24.846.253.127.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Tujuan:														
Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50,70	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	-	-	37,33	-	-	-	54,00
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	10,24	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	-	-	17,11	-	-	-	13,00
Sasaran:														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88,72	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	88,61	76,64	76,70	-	-	-	76,50
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	-	-	1,02	-	-	-	35,00
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,13	77,20	77,50	77,75	78,00	78,50	81,08	79,71	80	-	-	-	80

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase koperasi yang berkualitas”, sampai dengan Triwulan II 2023 tercapai sebesar 37,33 % dari target sebesar 54 % atau baru sebesar 69,13 %.
- b. Tujuan **“Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2023 sudah sebesar 17,11% dari target sebesar 13,00% (capaian sebesar 131,62%);
- c. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koperasi aktif”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2023 sudah sebesar 76,70% dari target sebesar 76,50% (capaian sebesar 100,26%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 baru tercapai 1,02 % dari target 35% (capaian sebesar 0,75%); karena kesulitan dalam mendata Usaha Mikro yang terdaftar melalui OSS.
- e. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2023 realisasinya sebesar 80% dari target sebesar 77,20% (capaian sebesar 103,63%);

Selain dari aspek capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	TW. II 2023	2023	2024
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Selanjutnya, selain realisasi dari target Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Tabel 2. 5 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	TW.II 2023	2023	2024	
ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Persentase koperasi aktif	%	76%	76,50%	77%	77,5%	78%	76,64%	76,70%	-	77%	
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	12%	13%	14%	15%	16%	16,93%	17,11%	-	14%	
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53%	54%	55%	55%	56%	48,22%	37,33%	-	55%	

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

Dari tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah 2 indikator sudah melampaui target yaitu Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Indikator Meningkatnya usaha Mikro menjadi wirausaha, sedangkan 1 indikator yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas masih dalam tahap pencapaian target.

Untuk selanjutnya sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKD di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender. Data

menunjukkan dari 8 program, 14 kegiatan, dan 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2023, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 2 program (25%), 2 kegiatan (14,29 %) dan 3 sub kegiatan (7,89 %). Adapun untuk jumlah anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di tahun 2023 adalah sebesar Rp 34.004.240.168,- sementara jumlah anggaran yang responsif gender (anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebesar Rp 3.400.357.960,- (9,99 %).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Secara umum kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

- a. Belum tersedianya database Pelaku UMKM di Kota Semarang;
- b. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Pengurus/pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang
- c. Masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS berbasis Resiko;
- d. Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga Keuangan Perbankan/Non Perbankan;
- e. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- a. Perlunya dibangun sebuah sistem terkait database UMKM di Kota Semarang
- b. Optimalisasi pelatihan Perkoperasian dan Uji Kompetensi bagi pengelola Koperasi dan manajemen kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro;
- c. Optimalisasi kegiatan sosialisasi pengurusan IUMK melalui OSS RBA kepada para pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang;
- d. Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro serta penyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan/Non Perbankan
- e. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
 - Lambatnya regenerasi didalam Koperasi.
 - Lemahnya komunikasi diantara lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan KUMKM.
 - kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro.
 - Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.
 - Kemampuan dan Pengetahuan Tehnologi Informasi KUMKM masih terbatas.
- b. Peluang:
 - Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.

- Keberpihakan Pemerintah kepada KUMKM melalui Peraturan Perundang-undangan antara lain UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas yang memaksa UMKM untuk berkompetisi.
- Beragamnya Produk UMKM serta Sumber daya alam yang masih melimpah.
- Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

1. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasidan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 kegiatan ekspor roduknya; dan perlunya Optimalisasi PengembanganObyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE
2. Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: Meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan investasi, peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran produk, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				31.686.684.236	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				31,826,684,236	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	214.521.290	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	214,521,290	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	91.666.650	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Kop	91,666,650	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Unit Usaha	91.666.650	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	91,666,650	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	122.854.640	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Kop	122,854,640	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140 Unit Usaha	122.854.640	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	122,854,640	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	423.919.290	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	463,919,290	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490 kop	423.919.290	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	463,919,290	

	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Unit Usaha	132.027.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Unit Usaha	172,027,000	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja		291.892.290			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja		291,892,290	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	31 Persen	366.205.089	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	32 Persen	366,205,089	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60%	366.205.089	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68%	366,205,089	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	366.205.089	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	366,205,089	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	569.033.650	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	569,033,650	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%					Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan		1%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	569.033.650	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75%	569,033,650	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360 org	569.033.650	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 org	569,033,650	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	2.636.334.793	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	2,604,277,614	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.636.334.793	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2,604,277,614	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500 org	2.540.277.614	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan Perlindungan Koperasi	400 Unit Usaha	2,604,277,614	

	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3.723.800.110	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3,759,800,110	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	1.050 org	3.723.800.110	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	3,759,800,110	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	274.550.700	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	274,550,700	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	168.579.010	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	168,579,010	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660 org	1.311.148.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 org	1,311,148,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500 org	447.272.910	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 org	483,272,910	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 org	1.522.249.490	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		1,522,249,490	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	12.221.316.838	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	12,221,316,838	

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150 org	12.221.316.838	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	12,221,316,838	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	12.221.316.838	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	12,221,316,838	
	NON URUSAN					NON URUSAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.627.610.355	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11,627,610,355	
		Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dok	12.195.580	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dok	12,195,580	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	564.080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	564,080	
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RTP SKPD	1 dok			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RTP SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.117.280	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3,117,280	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3.729.190	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3,729,190	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.610.080	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1,610,080	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.961.990	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1,961,990	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.212.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1,212,960	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	8.293.676.908	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	8,293,676,908	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 org/bln	8.070.065.228	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	8,070,065,228	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	222.320.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dok	222,320,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	596.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	596,480	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	695.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	695,200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.129.052.456	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1,129,052,456	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	259.807.069	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	259,807,069	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	17.268.890	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	17,268,890	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	57.076.870	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	57,076,870	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	28.900.059	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	28,900,059	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,920,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	54.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	54,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	530.397.860	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	530,397,860	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	179.681.708	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	179,681,708	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	668.189.134	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	668,189,134	
	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	617.664.398	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	617,664,398	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.524.736	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50,524,736	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	116.640.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	116,640,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116,640,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	1.407.856.277	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	1,407,856,277	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36,318,180	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	348.054.470	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	348,054,470	
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	47.299.720	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	47,299,720	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	976.183.907	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	976,183,907	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02

6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.

- 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
- 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

dengan indikator tujuan :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
- b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Koperasi aktif
- b. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023

mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	- Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	54,00
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	13,00
SASARAN :			
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	- Persentase Koperasi aktif	%	76,50
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	- Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	35,00
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	%	77,50

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bertugas mendukung pencapaian Misi ke 2 “Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Laju Pertumbuhan ekonomi” dan indikator sasaran “ Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB”.
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	214.521.290	214.521.290	214.521.290	APBD	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	15 kop	15 kop	91.666.650	91.666.650	91.666.650	APBD	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	91.666.650	91.666.650	91.666.650	APBD	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	2 kop	2 kop	122.854.640	122.854.640	122.854.640	APBD	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140 unit usaha	140 unit usaha	140 unit usaha	122.854.640	122.854.640	122.854.640	APBD	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50%	50%	554.915.380	554.915.380	423.919.290	APBD	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490 unit usaha	490 unit usaha	100 unit usaha	554.915.380	554.915.380	423.919.290	APBD	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	370 unit usaha	370 unit usaha	370 unit usaha	241.871.090	241.871.090	132.027.000	APBD	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundangundangan	240 unit usaha	240 unit usaha	240 unit usaha	313.044.290	313.044.290	291.892.290	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	31%	31%	31%	366.205.089	366.205.089	366.205.089	APBD	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60%	60%	60%	366.205.089	366.205.089	366.205.089	APBD	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 unit usaha	300 unit usaha	300 unit usaha	366.205.089	366.205.089	366.205.089	APBD	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	10%	10%	335.896.070	378.117.270	569.033.650	APBD	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitas Pelatihan	1%	1%	1%					
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	70%	72%	335.896.070	378.117.270	569.033.650	APBD	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360 org	360 org	240 org	335.896.070	378.117.270	569.033.650	APBD	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26%	26%	26%	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	APBD	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	50%	50%	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	APBD	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500 org	500 org	2.447 org	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	APBD	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3%	3%	3.792.070.650	4.388.692.350	3.723.800.110	APBD	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	1050 org	1050 org	600 org	3.792.070.650	4.388.692.350	3.723.800.110	APBD	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	0,00 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	522.672.200	325.664.600	274.550.700	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 unit usaha	100 unit usaha	200 unit usaha	227.454.550	227.454.550	168.579.010	APBD	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660 unit usaha	660 unit usaha	410 unit usaha	2.080.993.000	2.128.093.000	1.311.148.000	APBD	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500 org	500 org	605 org	515.022.000	467.922.000	447.272.910	APBD	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 org	150 org	900 org	445.928.900	1.239.558.200	1.522.249.490	APBD	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	20%	20%	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	APBD	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150 org	150 org	100 org	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	APBD	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 unit usaha	500 unit usaha	1.300 unit usaha	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	APBD	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	12.711.962.479	12.636.263.149	11.627.610.355	APBD	
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dok	10 dok	9 dok	12.195.580	12.195.580	12.195.580	APBD	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	564.080	564.080	564.080	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	3.117.280	3.117.280	3.117.280	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	3.729.190	3.729.190	3.729.190	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.610.080	1.610.080	1.212.960	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.961.990	1.961.990	1.212.960	APBD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	1.212.960	1.212.960	1.212.960	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	9.215.117.840	9.212.357.840	8.293.676.908	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok							
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 org/bln	35 org/bln	35 org/bln	8.960.986.160	8.960.986.160	8.070.065.228	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	12 dok	12 dok	252.840.000	250.080.000	222.320.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	596.480	596.480	596.480	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	695.200	695.200	695.200	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.241.092.527	1.141.188.772	1.129.052.456	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	14 paket	15 paket	231.107.778	241.380.275	259.807.069 D	APBD	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	27.209.000	27.209.000	17.268.890	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	94.077.190	94.077.190	57.076.870	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	46.964.379	46.964.379	28.900.059	APBD	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	12 dok	1.920.000	1.920.000	1.920.000	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	12 lap	12 lap	54.000.000	54.000.000	54.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	537.215.860	537.215.860	530.397.860	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 dok	8 dok	8 dok	248.598.320	138.422.068	179.681.708	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	95.362.120	95.362.120	668.189.134	APBD	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	14 unit	44.837.384	44.837.384	617.664.398		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	50.524.736	50.524.736	50.524.736		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	116.640.000	116.640.000	116.640.000		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	116.640.000	116.640.000	116.640.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	2.031.554.412	2.058.518.837	1.407.856.277		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	25 unit	25 unit	316.345.380	348.054.470	348.054.470		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 unit	63 unit	50.476.070	50.476.070	47.299.720		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1.628.414.782	1.623.670.117	976.183.907		
JUMLAH										

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

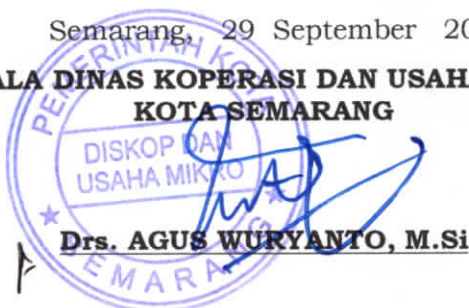
Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 29 September 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si